

Judul : Penyelesaian kasus HAM, Senayan dukung langkah pemerintah
Tanggal : Jumat, 19 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 5

Penyelesaian Kasus HAM

Senayan Dukung Langkah Pemerintah

KOMISI XIII DPR menyambut baik langkah Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang meluncurkan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu. Hal ini sebagai implementasi komitmen pemerintahan Prabowo Subianto dalam bidang HAM.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya berharap peta jalan tersebut bisa menjadi solusi progresif dan bukan sekadar simbolik. Penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu bukan perkara yang sederhana. Sebab ada banyak lapisan yang harus benar-benar dipertimbangkan secara matang.

"Kebersamaan dalam pembahasan peta jalan tersebut harus dipertahankan dalam implementasinya. Sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar progresif dan terukur," ucap Willy dalam keterangannya, Rabu (17/12/2025).

Diketahui, Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu disusun bersama antara Pemerintah atau Kementerian HAM, Komnas HAM, korban dan keluarga korban serta para pemangku kepentingan lainnya. Dalam peta jalan tersebut tercatat ada 12 kasus pelanggaran HAM Berat yakni peristiwa 1965-1966, Talangsari 1989, penembakan misterius 1982-1985, kerusuhan Mei 1998 termasuk Trisakti,

Semanggi I dan II.

Kemudian, penghilangan paksa 1997-1998, Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) Aceh 1999, peristiwa santet Banyuwangi 1998, Wasior 2001, Jambu Keupok Aceh 2003, Rumah Geudong Aceh 2001-2002, dan Wamena 2003.

Willy melanjutkan, suasana kebersamaan dalam pembahasan yang menghasilkan peta jalan perlu dipertahankan agar solusi dapat dihasilkan secara baik dalam ke-mufakatan. Kebersamaan tersebut penting agar fase-fase keberhasilan yang sudah dilalui sebelumnya dapat dilanjutkan. "Negara ini dibangun dengan musyawarah. Semua didialogkan dan tidak ada menang-menangan," tegasnya.

Bila musyawarah dan dialog terjadi di dalam implementasi peta jalan, Willy berkeyakinan, hasilnya akan semakin progresif. Sebab semua pihak sudah belajar dari upaya yang sama di periode lalu untuk tidak mengulanginya di masa yang akan datang.

Willy menekankan upaya penyelesaian justisial maupun non justisial terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu memang diperlukan. Pembelajaran dari banyak negara di dunia menunjukkan dua jalur yang tidak terpisah di dalam penyelesaian pelanggaran HAM. "Jika dilihat lebih men-



Willy Aditya

dalam upaya mengembalikan hak-hak korban menjadi konsentrasi penting dari banyak praktik di negara lainnya," ucapnya.

Dia menegaskan, perspektif korban harus dikedepankan agar penyelesaian ini dirasakan keadilannya bagi para korban di masa lalu. Sambil terus memperbaiki mekanisme-mekanisme dan sistem yang ada untuk masa depan.

Dia menambahkan komitmen besar Presiden Prabowo dalam bidang HAM benar-benar harus dijawab dengan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi publik. Hal ini harus ditempatkan dalam konteks implementasi peta jalan yang dimaksud.

Dengan itu, Willy menyarankan celah apa pun yang terbuka un-

tuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu harus dimanfaatkan. "Tapi kita perlu membangunnya secara strategis dengan tetap mengedepankan kemanfaatan bagi para korban," harap dia.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion menambahkan, peta jalan tersebut harus menjadi langkah konkret negara untuk mengungkap kebenaran, menghadirkan keadilan dan menuntaskan pelanggaran HAM berat di masa lalu. "Negara tidak boleh lagi menunda," tegas Mafirion di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Mafirion menilai, kehadiran peta jalan menjadi sinyal komitmen negara dalam menjamin hak asasi warga negara serta memenuhi kewajiban konstitusional dan moral terhadap korban dan penyintas pelanggaran HAM berat.

Peta jalan tersebut juga mencerminkan komitmen Indonesia terhadap berbagai instrumen HAM internasional yang telah diratifikasi. Antara lain; Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

Secara nasional, hal itu sejalan dengan UUD 1945 yang menjamin dan melindungi HAM. "Penyelesaian berbagai kasus di masa lalu akan membawa Indonesia menjadi negara yang secara substantif menghormati dan menegakkan HAM," tegas politikus PKB ini.

Pengakuan negara atas kasus-kasus tersebut, lanjutnya, tidak boleh berhenti pada tataran simbolik. Penyelesaian harus dilakukan secara konkret. Caranya melalui proses hukum terhadap pelaku serta pemulihan korban dan penyintas secara menyeluruh dan berkeadilan.

Dia mengungkapkan, saat ini capaian pemilihan korban pelanggaran HAM masih relatif rendah. Berdasarkan data Kementerian HAM, sekitar 600 korban telah dipulihkan dari total lebih dari 7.000 korban yang teridentifikasi. "Peta jalan harus menjawab kesenjangan tersebut," desak legislator asal dapil Riau ini.

Selain itu, Mafirion meminta agar peta jalan disusun sebagai panduan kerja yang terukur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Khususnya dengan tahapan, target waktu, serta mekanisme evaluasi yang transparan. ■ TIF